

LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPR Nusamba Tegallalang

2023

Berizin dan
diawasi OJK

Otoritas
Jasa
Keuangan



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



BANK
PEREKONOMIAN
RAKYAT

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Nusamba Tegallalang pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR NusambaTegallalang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Nusamba Tegallalang dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Gianyar. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Nusamba Tegallalang didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Nusamba Tegallalang.

BPR Nusamba Tegallalang telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Nusamba Tegallalang selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun mendatang, BPR Nusamba Tegallalang terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Made Suwitrayasa, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan. 10. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. 11. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank. 12. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 13. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. 14. Bertanggung Jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 15. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud 16. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 17. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. 18. Memastikan penerapandan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen 19. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian. 			
2.	Nama	:	I Nyoman Suarjana, SH
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan 			

Manajemen Risiko secara optimal.

2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien .
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
6. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
7. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
8. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
9. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
10. Bersama- sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
11. Bersama- sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
12. Bersama- sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
13. Bersama- sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
14. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud
15. Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
16. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen
17. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Melakukan Sosialisasi RBB 2023 kepada pejabat eksekutif , Kepala bidang dan KKK dalam persamaan frekuensi dan pencapaian
2. Pembentukan PPAP khusus kredit macet yg berulang tahun telah dilakukan sesuai regulasi
3. Direksi telah melakukan langkah dan upaya penyelesaian AYDA dengan cara memasarkannya dibantu oleh sahabat nusamba
4. Direksi telah mengeluarkan kebijakan berupa SK tentang Ketentuan atas Pemberian Kredit Secara Tidak Langsung melalui Fintech P2P Landing Komunal untuk meningkatkan produktivitas melalui penyaluran kredit
5. Melakukan peningkatan kualitas SDM khususnya unit Bisnis dalam membentuk pondasi yang tangguh dan kuat dalam melihat peluang pasar
6. Melakukan penyelesaian NPL dgn skala prioritas dan fokus pembinaan debitur tergolong DPK untuk menahan laju NPL
7. Untuk menunjang penagihan kredit hapus buku, direksi telah mengeluarkan kebijakan berupa SK tentang Insentif Hapus Buku dimana insentif diberikan kepada karyawan yang berhasil menagih kredit yang dihapus buku sebesar 10% dari total tagihan untuk menunjang perolehan laba.
8. Pengelolaan database dan optimalisasi dilakukan , dipantau melalui WA group serta dipasilitas geogle drive setiap staf bisnis
9. Direksi telah menyusun target dan realisasi dievaluasi bersamaan dgn rapat internal (GKL) dan disampaikan dalam rapat koordinasi antarkantor
10. PPAP umum telah dipenuhi dan action plan telah dibuat secara sistematis yg dipantau setiap minggu III
11. Direksi telah membuat action plan penyelesaian Kredit relaksasi / restrukturisasi COVID'19

<p>dan penyelesaian AYDA secara sistematis akan tetapi kurang disiplin dalam eksekusi</p> <p>12. Direksi telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja disetiap bulannya, baik team bisnis maupun operasional dalam rangka memperbaiki kinerja</p> <p>13. Direksi telah melakukan pelatihan Telemarketing untuk team frontliner dan team bisnis untuk mengoptimalkan ekspansi pasar khususnya KYD</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Ketut Komplit, SH
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. 5. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan 6. Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. 7. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 8. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud 9. Mengawasi kebijakan Direksi. 10. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 11. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi. 12. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. 13. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran. 14. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi. 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 16. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 		
2.	Nama	:	I Made Artana, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama- sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama- sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 		

3. Bersama- sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Bersama- sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.
5. Bersama- sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
6. Bersama- sama Komisaris Utama memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
7. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud
8. Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi.
9. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
10. Bersama – sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.
11. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
12. Bersama- sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.
13. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada Direksi.
14. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar .
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Melakukan evaluasi yang cepat atas kebijakan pertumbuhan kredit dan pendekatan dengan komunal dalam penyaluran kredit dan meningkatkan produktivitas
2. Upgrade kualitas dan penambahan SDM sesuai kebutuhan untuk dapat meningkatkan produktivitas khususnya unit Bisnis dalam membentuk pondasi yang tangguh dan kuat dalam melihat peluang pasar
3. Penyelesaian NPL dgn skala prioritas ,Fokus pembinaan debitur tergolong DPK untuk menahan laju NPL dan penagihan kredit WO untuk menunjang perolehan laba.
4. Membuat action plan penyelesaian AYDA secara detail dan analisa risikonya sesuai ketentuan serta Disiplin eksekusi
5. Membangun ,mengoptimalkan , memanfaatkan data base dan penerapan Tele-marketing dalam ekspansi pasar khususnya KYD serta pemeliharaan Nasabah
6. Membuat target penyelesaian/ pembayaran Bunga atas kredit relaksasi Covid'19 ,Fokus pembinaan debitur tergolong DPK untuk menahan laju NPL dan penagihan kredit WO untuk meningkatkan perolehan / pencapaian laba
7. Memenuhi kekurangan PPAP umum sesuai ketentuan 0,5% dan membuat actionplan terhadap debitur macet yang berpotensi adanya pembentukan PPAP khusus yg akan timbul ditahun 2023
8. Membuat action plan penyelesaian Kredit relaksasi/ restrukturisasi COVID'19 dan penyelesaian AYDA secara sistematis , terukur berdasarkan analisa yang cukup sesuai ketentuan selanjutnya hasil disampaikan ke Dekom setiap bulan
9. Melakukan Evaluasi kebijakan dan Team pada Internal BPR atas kelemahan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
10. Membangun ,mengoptimalkan , memanfaatkan data base dan penerapan Tele-marketing dalam ekspansi pasar khususnya KYD serta pemeliharaan Nasabah
11. Disiplin Eksekusi atas actionplan kredit relaksasi Covid'19 , dan penagihan kredit WO

<p>untuk meningkatkan perolehan / pencapaian laba</p> <p>12. Melakukan kajian atas penyelesaian kredit macet yg berpotensi timbulnya pembentukan PPAP tahun 2023</p> <p>13. Direksi selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses kredit dan penyelesaian kredit</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki komite/nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-

	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Made Suwitrayasa, SE	Rp0	0%
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada kepemilikan saham Direksi pada BPR Nusamba Tegallalang			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Made Suwitrayasa, SE	-	-	0%
2.	I Nyoman Suarjana, SH	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki saham di BPR lain dan perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Made Suwitrayasa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Made Suwitrayasa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Komplit, SH	Rp0	0%
2.	I Made Artana, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Komplit, SH	-	-	0%
2.	I Made Artana, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Komplit, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Komplit, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp466.000.000	2	Rp241.800.000
2.	Tunjangan	2	Rp40.997.000	2	Rp15.600.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp506.997.000		Rp257.400.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan hasil RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Pulsa (2), Asuransi Jiwa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)	Tunjangan Pulsa (2), Asuransi Jiwa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan terendah sudah sesuai dengan surat keputusan para pemegang saham diluar RUPS BPR	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	17 Maret 2023	2	1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Pebruari 2023 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan IV tahun 2022

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
2.	12 Juni 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Mei 2023 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan I tahun 2023 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
3.	18 September 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Agustus 2023 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan II tahun 2022 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
4.	12 Desember 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Nopember 2023 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan III tahun 2022 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
5.	11 Desember 2023	2	Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Nusamba Tegallalang tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 5 kali dalam tahun 2023			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Ketut Komplit, SH	5	0	100%
2.	I Made Artana, SE	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara langsung di ruang rapat PT. BPR Nusamba Tegallalang				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yg dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap pada BPR Nusamba Tegallalang								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Pada tahun 2023 BPR NUSamba Tegallalang tidak ada menghadapi permasalahan hukum.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
PT. BPR Nusamba Tegallalang tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pada tahun 2023 PT. BPR Nusamba Tegallalang tidak melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Nusamba Tegallalang
Alamat	: Jalan Raya Tegallalang Gianyar
Nomor Telepon	: 0361980805
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp8.000.523.126
Total Aset	: Rp121.799.164.958

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Nusamba Tegallalang Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.67	0.334
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.94	0.291
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.39	0.239
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.35	0.235
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.34	0.334
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.57	0.193
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.67)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di BPR Nusamba Tegallalang telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti, tindak lanjut hasil audit intern, mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, dan peningkatan kinerja BPR lebih diperhatikan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.94)

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dewan Komisaris telah lulus uji Fit & Proper Test sehingga integritas dan reputasi yang dimilikinya mampu bertanggung jawab kepada Pemegang Saham serta stakeholders secara independen. Dewan Komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan tugas, sehingga mampu mengontrol, memberikan saran dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

tidak menerapkan komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada BPR Nusamba Tegallalang telah diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan yang berlaku sejak 27 Desember 2016 dan juga terdapat dalam pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan diberlakukannya Pedoman Benturan Kepentingan tersebut memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.39)

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan Bank di BPR Nusamba Tegallalang telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.35)

Pada BPR Nusamba Tegallalang Satuan Kerja Audit Internal selaku yang bertanggung jawab menjalankan fungsi audit intern menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum staf melalui rekomendasi yang independen dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan fungsi audit ekstern di BPR Nusamba Tegallalang dilakukan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditetapkan, sehingga hasil audit dan management letter yang disampaikan oleh KAP kepada BPR lengkap dan transparan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3.34)

Untuk BPR yang modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) penerapan Manajemen Risiko akan berlaku efektif pada semester 2 tahun 2021.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Nusamba Tegallalang telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.57)

Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi BPR Nusamba Tegallalang sesuai dengan visi dan misi Bank, termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Sistem pelaporan keuangan pada BPR Nusamba Tegallalang sudah transparan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page Nusamba Tegallalang. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai Pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:


Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Nusamba tegallalang masih dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja dimasa yg akan datang, namun hal tersebut sedikit demi sedikit diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Gianyar, 30 Januari 2024

PT. BPR Nusamba Tegallalang


Made Suwitrayasa, SE
Direktur Utama


I Ketut Komplit, SH
Komisaris Utama